

EDUKASI BUDAYA DAN SEJARAH PEMBUATAN KAPAL PHINISI DI MAKASSAR

Sejumlah murid sekolah dasar didampingi orang tua dan gurunya melihat pembuatan Kapal Phinisi di Makassar, Sulsel, Senin (11/12). Pembuatan Kapal Phinisi tersebut dimanfaatkan oleh sejumlah sekolah di daerah itu untuk mengedukasi siswa tentang budaya dan sejarah Kapal Phinisi yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB) oleh UNESCO pada 7 Desember 2017.



Pengusaha Wisata Keluhkan Kondisi Infrastruktur Jalan dan Minimnya PJU

Kondisi infrastruktur yang rusak juga minimnya PJU dirasa sangat vital ketika kunjungan wisatawan pada malam hari menuju kawasan obyek wisata. Sebagian besar penerangan jalan menuju obyek wisata berasal dari rumah-rumah warga sekitar karena kurangnya PJU dari pemerintah.

PANDEGLANG (IM) - Pengusaha obyek wisata yang menawarkan nuansa alam mengeluhkan masih minimnya infrastruktur jalan dan penerangan jalan umum (PJU) menuju kawasan di Wisata Gunung Karang, Desa

Pasir Peuteuy, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang. Hal itu disampaikan Alex T. Suyitno salah satu pengelola Wisata Villa Hijau di Desa Pasir Peuteu. Menurutnya, kondisi infrastruktur yang

rusak juga minimnya PJU dirasa sangat vital ketika kunjungan wisatawan pada malam hari menuju kawasan obyek wisata.

"Iya banyak juga masukan dari para pengunjung dengan kondisi jalan sama PJU, apalagi ketika pengunjung yang datang siang dan sore mau pulang dengan mau pulang kondisinya gelap agak khawatir takut," ungkapnya, Senin (11/12).

Menurutnya, sangat penting ketika infrastruktur jalan yang baik serta penerangan jalan umum (PJU) bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar maupun pengunjung wisata.

"Terutama jalan yang rusak sama PJU-nya, karena yang sama-sama kita ketahui

mulai dari Kampung Cihaseum menuju arah Kaduengang dan Pasir Peuteuy itu memang tidak ada PJU," tuturnya.

Ia menjelaskan, bahwa sebagian besar penerangan jalan menuju obyek wisata berasal dari rumah-rumah warga sekitar karena kurangnya PJU dari pemerintah.

"Iya itu memang tidak ada PJU jadi penerangannya lebih banyak dari rumah warga yang tersambung. Kalau PJU dari pemerintah itu kayaknya belum turun belum ada," jelasnya.

Alex T. Suyitno berharap dengan kondisi yang memang kebutuhan yang sangat vital ini perlunya perhatian khusus dari Pemkab Pandeglang baik akses infrastruktur

jalan maupun PJU tersebut.

"Iya mudah-mudahan dari Pemkab Pandeglang bisa menyediakan atau memfasilitasi infrastruktur jalan juga PJU-nya," harapnya.

Selain itu, dia juga mengajak kepada pemerintah daerah untuk memberikan dukungan kepada obyek wisata Gunung Karang guna menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

"Ya kepada pemerintah daerah untuk ikut memberi semangat dan supportnya kepada kami, yang kedua yang pasti membuka lapangan pekerjaan," pungkasnya. ● pra



REALISASI PENYALURAN BANTUAN PANGAN BERAS TAHAP II CAPAI 92 PERSEN

Sejumlah pekerja mengangkut beras untuk program bantuan pangan nasional di gudang Bulog Kota Serang, Banten, Senin (11/12). Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita menyatakan hingga akhir November 2023 penyaluran bantuan pangan beras telah mencapai 586.556 ton atau 92 persen dari target pemerintah.

DPPPA Kab. Tangerang Lakukan Pemilihan Perempuan Inspiratif

TANGERANG (IM) - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Tangerang melakukan pemilihan Perempuan Inspiratif Kabupaten Tangerang 2023.

Hal tersebut merupakan bagian dari rangkaian Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-95.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Serang, Asep Suherman, mengatakan bahwa pemilihan Perempuan Inspiratif Kabupaten Tangerang 2023 merupakan bagian dari rangkaian Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-95.

"Saya menilai, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan meski seringkali perspektif mereka masih sering diabaikan atau kurang terwakili," ungkap Asep, Senin (11/12).

Maka dari itu katanya, perlu upaya konkret untuk memberikan pemikiran yang memungkinkan perempuan untuk bersuara, berpartisipasi dan mempengaruhi perubahan di setiap sektor khususnya di masyarakat. "Nah, salah satunya dengan digelar kegiatan seperti ini," ucapnya.

Asep menerangkan, pemilihan perempuan inspiratif merupakan salah satu bentuk apresiasi Pemerintah Daerah kepada perempuan di wilayah Kabupaten Tangerang.

"Nah, melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang ingin meningkatkan peran dan menginspirasi perempuan di berbagai bidang, di antaranya pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi kreatif," terangnya.

Dirinya menambahkan, pemilihan Perempuan Inspiratif Kabupaten Tangerang 2023 diikuti oleh 60 peserta dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Tangerang.

Di mana, para peserta diseleksi menjadi 20 orang. Kemudian mereka kembali bersaing untuk menjadi juara dari sejumlah kategori.

"Saya berharap, melalui kegiatan ini perempuan dapat menginspirasi serta membangkitkan potensi yang optimal untuk kemajuan bangsa," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tangerang, Mirasari Andi Ony, mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Sebab, menurutnya, kegiatan ini dapat mendorong perempuan di Kabupaten Tangerang untuk percaya diri serta memiliki daya saing yang tinggi. "Program pemilihan perempuan inspiratif ini sangat luar biasa untuk memberikan motivasi, kemampuan dan keterampilan kepada kaum perempuan," tutupnya. ● pp

Belanja Negara 2024 Banten Naik Jadi Rp28,40 Triliun

SERANG (IM) - Belanja Negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2024 untuk Provinsi Banten naik 9,92 persen menjadi Rp28,40 triliun.

Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat untuk 367 Instansi Vertikal sebesar Rp10,67 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah untuk 9 Pemerintah Daerah sebesar Rp17,73 triliun.

Plh. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Dody Fachrudin mengatakan, belanja negara diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan inflasi, peningkatan Investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA deregulasi dan penguatan institusi.

"APBN berupaya maksimal untuk memenuhi seluruh program-program prioritas pembangunan di Provinsi Banten, dari mulai memberikan jaring pengaman untuk rakyat dan kelompok rentan, menjaga laju konstan roda perekonomian mendorong transformasi,

dan membangun infrastruktur penunjang kegiatan masyarakat. Penggunaan Dana APBN harus terus bermanfaat, efektif dalam menjaga perekonomian dan masyarakat Banten," ujar Dody usai menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024 di Pendopo Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Senin (11/12).

APBN tahun 2024 merupakan instrumen untuk mengangkal tantangan dan ancaman terhadap stabilitas. Oleh karena itu APBN didesain antisipatif, waspada terhadap potensi krisis, resipohail, mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi, APBN dituntut untuk dapat mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem yang tahun 2024 ditargetkan dapat mendekati 0 persen.

Selain itu, APBN juga harus bisa membantu penurunan angka pengangguran penurunan gini rasio dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. "Program subsidi dan pertinsos akan didorong lebih tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program," ucapnya.

Sementara, DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para pimpinan instansi vertikal dan kepala daerah lingkup Provinsi Banten dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kinerja ekonomi Banten tetap terjaga baik, terlihat dengan pertumbuhan Triwulan III 2023 sebesar 4,97% YoY dan inflasi Banten dan 3 Kota Besar yakni Serang, Tangerang dan Gilegon terjaga rendah dan stabil (2.35%) cukup jauh di bawah Inflasi Nasional (2,56%)

"Kami berharap agar DIPA Instansi Vertikal dan Daftar Alokasi TKD di tahun 2024 segera dapat ditandatangani oleh para Pimpinan lingkup Provinsi Banten, sehingga pelaksanaan APBN 2024 dapat disejerakan dan masyarakat Banten dapat langsung merasakan manfaat pada awal 2024," pungkasnya. ● pra



SIDAK MAKANAN DI SOLO

Sejumlah petugas dari tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan Kota Solo memeriksa produk makanan ringan saat sidak di Pasar Gading Solo, Jateng, Senin (11/12). Sidak makanan yang digelar di pasar tradisional, pusat oleh-oleh dan swalayan tersebut sebagai pengawasan dan pembinaan bagi pedagang guna memberikan jaminan makanan sehat kepada masyarakat khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru 2024.

BKD Telusuri Link Video Syur ASN Pemprov Banten

SERANG (IM) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten saat ini tengah menginvestigasi video syur seorang wanita yang diduga merupakan pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Kepala BKD Banten, Nana Suryana mengatakan, dalam investigasi ini pihaknya bekerjasama dengan Diskominfo Provinsi Banten. Investigasi dilakukan secara hati-hati.

"Kita masih coba investigasi untuk memastikan dia itu ASN apa non ASN. Prinsipnya kita kehati-hatian, kita tidak mau ada fitnah," kata Nana saat di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (11/12).

Nana mengatakan, pihaknya saat ini belum dapat memastikan identitas dari pe-

meran video syur berseragam Pemprov Banten itu.

"Kita pastikan dulu, apa benar di ASN atau cuman pakai baju ASN. Kita ingin datanya clear dulu agar bisa segera kita sidang kode etik," katanya.

Saat tanya apakah terdapat video-video lain yang diperankan wanita itu, Nana mengaku pihaknya masih mengumpulkan data.

"Kita dapat informasi lini nya banyak, kita telusuri apa benar linknya banyak dan berbayar. Kita coba tracking ke situ," ucapnya.

Menurutnya, video syur itu tentunya telah menciderai etika publik. Pihaknya pun akan memberikan sanksi tegas kepada wanita itu jika benar terbukti merupakan pegawai ASN pemprov Banten. ● pra

Ratusan APK Langgar Aturan, Bawaslu Bakal Patroli Kampanye

SERANG (IM) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Serang akan melakukan patroli kampanye mulai pekan ini. Itu dilakukan untuk mengawasi para peserta pemilihan umum (Pemilu) yang melanggar aturan.

Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Serang, Fierly Murdiyat Maburri mengatakan, pihaknya akan melakukan patroli kampanye tersebut bersama aparat kepolisian, hingga Panwascam.

"Patroli bertujuan untuk memastikan tidak ada pelanggaran atau penghilangan APK yang telah dipasang sesuai ketentuan, serta memastikan tidak ada aktivitas kampanye yang tidak dilaporkan ke KPU dan Bawaslu," ujarnya, Senin (11/12).

Menurut Fierly, selama ini banyak aktivitas kampanye

para peserta Pemilu yang tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada KPU dan Bawaslu.

Terkait penanganan pelanggaran, sejauh ini Bawaslu Kota Serang sudah menerima dua laporan informasi awal. Satu berasal dari masyarakat, dan satu dari peserta pemilu," katanya.

Dijelaskan Fierly, laporan tersebut sedang dilakukan penelusuran informasi ke lapangan. Laporan pertama berkenaan dengan penggunaan fasilitas pemerintah saat kampanye, dan satu laporan lainnya tentang dugaan perusakan APK secara masif di sejumlah kelurahan di Kecamatan Cipocok Jaya.

"Kami berharap seluruh peserta pemilu mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga jalannya kampanye berlangsung dalam situasi yang kondusif," tuturnya. ● pra

Terkatung-katung, 137 Pengungsi Rohingya Dipindahkan ke Tugu Taman Ratu Safiatuddin

BANDA ACEH (IM) - Sebanyak 135 etnis Rohingya, yang menjadi korban konflik dan perdagangan manusia, terus mengalami penolakan oleh masyarakat Aceh.

Pantauan di lapangan hingga Senin (11/12), para pengungsi itu masih telantar. Awalnya mereka diantar warga ke kantor gubernur Aceh pada Minggu (10/12), lalu hendak dipindahkan ke Bumi Perkemahan Seulawah, tetapi truk yang mengantar mereka diadang masyarakat. Kemudian, mereka dipindahkan ke Tugu Taman Ratu Safiatuddin atau Taman PKA, Banda Aceh.

Di lokasi terlihat warga berdatangan untuk melihat para manusia perahu tersebut. Sementara itu pihak United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) belum memberikan keterangan.

Satgas Radio Antar-Penduduk Indonesia (RAPDI) Banda Aceh, Yan Fahrurroji,

mengatakan jumlah pengungsi bertambah dua orang jadi 137 setelah dua orang yang sebelumnya meninggalkan kelompok tersebut diamankan oleh polisi.

"Jumlah pengungsi Rohingya yang berada di depan kantor gubernur Aceh itu sebanyak 137 orang. Ada dua orang sebelumnya sempat diduga kabur, tetapi kembali lagi ke rombongan," katanya pada awak media.

Sebelumnya diberitakan, 135 orang pengungsi Rohingya mendarat di Dusun Blang Ulam, Gampong Lamreh, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar, Minggu (10/12), sekitar pukul 8.30 WIB. Mereka lalu dibawa ke kantor gubernur Aceh. Kapal pengungsi Rohingya mengalami kerusakan mesin dan kebocoran lambung di bagian kanan. Stok makanan di kapal juga telah habis. Mereka pun berlabuh di Aceh. ● pra

Pemkab Pandeglang Janji Bakal Sanksi Kades Ancam Hapus Bantuan Warga

PANDEGLANG (IM) - Pemkab Pandeglang memastikan bakal menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu soal kades yang ancam akan menghapus bantuan lewat voice note (VN). Pemkab memastikan bakal memberikan sanksi terhadap kades tersebut.

"Pasti akan kita tindak lanjut rekomendasi bawaslu tersebut," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD), Bunbun Buntara saat dikonfirmasi, Senin (11/12).

Bunbun mengatakan saat ini DPMPD masih mengkaji soal sanksi yang bakal diberikan kepada Kades yang diketahui bernama Suhandi Kepala Desa Karang Sari, Kecamatan Angsana. Ia mengatakan minggu ini DPMPD bakal menerapkan sanksi.

"Sedang diproses, insya Allah minggu ini (sanksi keluar) pasti ditindaklanjuti," katanya. Diketahui sebelumnya, Bawaslu Pandeglang mengatakan kepala desa yang mengirim voice note (VN) berisi ancaman menghapus bantuan warga berbeda pili-

han caleg pada Pemilu 2024 melanggar aturan. Kades tersebut melakukan pelanggaran terkait netralitas.

"Ada pelanggaran kaitan dengan netralitas kepala desa," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Pandeglang, Didin Tahajudin, kepada wartawan, Senin (4/12).

Didin mengatakan Kepala Desa Karang Sari, Kecamatan Angsana, yang diketahui bernama Suhandi melanggar Undang-Undang Desa. Didin mengatakan Bawaslu menyimpulkan adanya pelanggaran setelah melakukan pemeriksaan terhadap Suhandi.

Menurut Didin, kades itu mengakui bahwa suara dalam VN itu ialah suaranya. Didin mengatakan Kades itu mengaku tidak diintervensi dari pihak lain terkait VN tersebut.

"Teman-teman (Panwas) Angsana sudah melaksanakannya sudah membahas pleno, kesimpulan yang bersangkutan kepala desa itu melanggar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, itu melanggar pasal 29," ujarnya. ● pra